

BPK Pastikan Korupsi Hambalang

JAKARTA, TRIBUN - Anggota Panitia Kerja Hambalang DPR dari Fraksi PDIP, Dedi Gumelar, mendesak Badan Pemeriksa Keuangan jujur dan profesional melaksanakan audit proyek Hambalang senilai Rp 2,5 triliun.

Berbahaya, jika BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara tak bisa dipegang kebenarannya. Menurut Dedi, kejujuran para saksi dan tersangka terkait dugaan korupsi proyek Hambalang, juga bisa mengungkap megaskandal korupsi ini, kendati BPK tidak mengungkap fakta sebenarnya.

“Hasil audit Insya Allah sama dengan perasaan publik, terjadi penyelewengan. Ada aliran dana dan pidana korupsi.”

ALI MASYKUR MUSA

Anggota BPK

“BPK harus jujur dan profesional. Rakyat sudah cerdas melihat gelagat yang kurang beres terhadap keterangan soal intervensi. Lain hari lain jawaban, itu menunjukkan ketidakjujuran yang terjadi di BPK,” tegas Dedi Gumelar di Jakarta, Sabtu (20/10).

Dugaan intervensi hasil audit investigatif BPK atas proyek Hambalang makin menguat, manakala Anggota BPK seka-

ligus Pengarah Audit, Taufiequrrachman Ruki memberi pernyataan kontroversial dalam tempo sehari.

Jika sebelumnya, Ruki mengungkap indikasi kuat adanya intervensi dalam hasil akhir audit investigasi kasus Hambalang, yang ditandai hilangnya nama Menpora dan korporasi yang menerima ali-

■ Bersambung ke Hal 7

Johnson Panjaitan
Praktisi Hukum

BPK Bermasalah

KELAMBANAN Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit proyek pembangunan pusat olahraga Hambalang di Sentul ini patut disayangkan. Hampir setahun diminta DPR dan KPK, BPK belum juga menyerahkan laporan audit investigasinya.

Awalnya, dijanjikan audit selesai dikerjakan Mei 2012, lalu minta perpanjangan waktu.

Sekarang penjelasan-penjelasan yang disampaikan pimpinan BPK banyak yang bertentangan.

Misalnya, anggota BPK Ali Masykur Musa mengatakan akan membahas laporan audit, tapi anggota lainnya mengatakan masih harus dilakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang diduga terlibat.

■ Bersambung ke Hal 7

BPK Pastikan Korupsi Hambalang

Sambungan Hal. 1

ran dana dalam laporan.

Padahal, dalam pemeriksaan awal yang dilakukan BPK, terdapat sejumlah bukti keterlibatan Andi dan sejumlah perusahaan kontraktor tersebut. Hilangnya nama Andi dan korporasi terungkap saat sidang anggota BPK, 17 Oktober 2012.

Ruki menolak membubuhkan tandatangan dalam laporan audit, sebelum diperbaiki. Bukan hanya nama Andi Mallarangeng yang hilang, dalam proyek itu ada perusahaan PT Dutasari Citralaras dan PT Adhi Karya yang tak tercantum.

Seperti telah diketahui publik, di PT Dutasari Citralaras, istri Ketum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Athiyyah Laila pernah duduk sebagai komisaris. Athiyyah sudah diperiksa KPK terkait dugaan korupsi proyek Hambalang.

Kendati demikian hanya hitungan beberapa jam, Ruki berbalik setelah mengikuti rapat bersama Menkeu Agus Martowardojo di kantor Kemenkeu Jakarta. Selain nama Andi Mallarangeng, audit investigasi BPK konon menyebut nama Menkeu Agus Martowardojo, Wamenkeu Anny

BPK Bermasalah

BPK berlama-lama, membuang waktu yang diperlukan KPK dan DPR untuk pengusutan dugaan penyimpangan proyek Hambalang ini, terutama menyangkut persoalan hulu sampai hilirnya.

Pengakuan Taufiequrrahman Ruki yang menjabat anggota BPK sekaligus pengarah investigasi Hambalang, bahwa ada intervensi sehingga ada nama-nama yang ada hilang dalam laporan audit investigasi,

Ratnawati, Dirjen Anggaran Kemenkeu Herry Purno dan mantan Kepala BPN Joyo Winto.

Para pejabat ini diduga melakukan pelanggaran sehingga menyebabkan kerugian negara dalam proyek Hambalang. Semua nama pejabat negara yang diduga terkait Hambalang, ada dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) proyek Hambalang.

Nama-nama itu, termasuk Menpora Andi Mallarangeng. Menurut Dedi, menjadi masalah besar, manakala nama-nama seperti Andi hilang di kesimpulan LHP. Apalagi, kata Dedi, Ketua BPK Hadi Purnomo pernah menyatakan, bahwa proyek Hambalang cacat bawaan atau cacat sejak lahir.

Proyek dipaksakan atas dasar motif dan tujuan tertentu. "Logika di luar hukum saja kita bisa lihat, kalau megaprojek ini tak ada komandannya. Apa mungkin bisa terwujud selain *mastermind*, penanggungjawab secara formal *kan* ada. *Leading* sektornya Kemenpora yang bertanggungjawab, logikanya menterinya," jelas Dedi.

Politisi PKS, Indra mencermati skandal megakorupsi

Hambalang, bukan kasus korupsi biasa. Indra mengaku menjadi tak terkejut mendengar adanya intervensi audit BPK.

"Intervensi terjadi karena parapihak yang terlibat kasus Hambalang. Termasuk mengkondisikan kesimpulan audit investigatif BPK agar tak mengait-ngaitkan dirinya," kata Indra.

Mengenai dugaan keterlibatan Menpora, Indra yakin Andi tahu betul seluk-beluk proyek Hambalang. Akankah BPK larut dalam pusaran kepentingan politik? Anggota BPK, Ali Masykur Musa menyatakan tidak. "Prosesnya hampir selesai. Saya yakin tak lama lagi kita keluarkan laporan tahap pertama, dua pekan lagi," ujar Ali.

Hasil pemeriksaan tahap pertama itu dinilai cukup membuktikan asumsi publik yang berkembang selama ini. "Yaitu, terjadi penyelewengan, ada aliran dana dan tindak pidana korupsi dalam proyek senilai Rp 2,5 triliun itu. Dan itu, sudah cukup komprehensif untuk masuk dalam rumah besar. Hambalang," jelas Ali. (tribunnews/thy/bsc/rol/rmo/tic)

Sambungan Hal. 1

tak bisa disepelekan.

Ini membuktikan ada persoalan penting yang terjadi dalam proyek tersebut, sehingga ada upaya menutup-nutupinya. Karena, orang yang omong ini bekas pimpinan KPK, tahu betul audit itu untuk apa. Dia juga orang yang sangat penting di BPK.

Sebelumnya, Ruki kan mengatakan laporan audit investigasi kasus Hambalang diintervensi. Peralnya, dalam laporan

nama menteri dan sejumlah perusahaan kontraktor tak dinyatakan terlibat. Padahal, dalam pemeriksaan awal ditemukan sejumlah bukti keterlibatannya. Perusahaan-perusahaan yang menurut Ruki terlibat itu antara lain PT Duta Citralaras dan PT Adhi Karya. Di Duta Laras itu, istri Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, yaitu Athiyyah Laila pernah menjabat sebagai komisaris. (tribunnews/alb/rmo)